

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya mengenai Analisis Penyusunan Anggaran Dan Realisasi Belanja Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam membuat dan merencanakan pengelolaan keuangan mencakup berbagai kebijakan seperti yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran, dengan meningkatkan prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah untuk mencapai suatu pemerintahan yang baik meningkatkan kualitas pengolahan keuangan yang baik.
2. Penyusunan anggaran adalah suatu proses membuat rencana kerja, yaitu menentukan berapa anggaran yang akan diberikan dan anggaran yang digunakan untuk setiap program yang diukur dalam satuan moneter. Anggaran harus disusun dengan cara meminimalkan pemborosan sumber daya, meningkatkan efisiensi dan efektivitas ekonomi serta mempertahankan rasa keadilan dan kepatuhan.
3. Laporan Realisasi Anggaran adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban suatu dinas/badan kepada pemerintah dalam penyusunan anggaran. Laporan ini harus dilengkapi dengan analisis perbandingan antara anggaran dan realisasi selama periode tertentu, sehingga dapat diidentifikasi kesalahan dan alasan dibalik kesalahan tersebut yang dapat berguna untuk periode yang akan datang.
4. Pelaksanaan sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah meliputi :

1. Penyusunan Renja Bappeda Provinsi Sumatera Barat pada tahun yang bersangkutan, dengan tahapan :
 - a. Persiapan Penyusunan Renja
 - b. Penyusunan Rancangan Awal Renja
 - c. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah direncanakan pada bulan Februari
 - d. Penyusunan Rancangan Kerja
 - e. Verifikasi RKA internal yang direncanakan di bulan Mei
 - f. Perumusan Rancangan Akhir Renja direncanakan di bulan Juni
 - g. Penetapan Renja
 - h. Orientasi Penyusunan Renja
2. Penyusunan RKA
3. Penyusunan Perubahan Renja Bappeda Provinsi Sumatera Barat pada tahun yang bersangkutan, dengan tahapan :
 - a. Persiapan Penyusunan Perubahan Renja
 - b. Penyusunan Rancangan Perubahan Renja
 - c. Verifikasi Perubahan RKA internal direncanakan pada bulan September
 - d. Perumusan Rancangan Akhir Perubahan Renja
 - e. Penetapan Perubahan Renja
4. Penyusunan Perubahan RKA dan Perubahan DPA pada tahun yang bersangkutan
5. Pelaksanaan Orientasi Renja yang direncanakan pada minggu 1 bulan Desember



5. Alur penyusunan penganggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat :

1. Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Sumatera Barat.
2. Membuat Agenda Kerja Penyusunan Renja Bappeda Provinsi Sumatera Barat.
3. Penyusunan Renja Bappeda Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat dan RKPD Provinsi Sumatera Barat, dengan tahapan :
 - a. Persiapan Penyusunan Renja Bappeda Provinsi Sumatera Barat
 - b. Penyusunan Rancangan Awal Renja Bappeda Provinsi Sumatera Barat
 - c. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah direncanakan pada Bulan Februari
 - d. Penyusunan Rancangan Renja Bappeda Provinsi Sumatera Barat berdasarkan hasil Forum Perangkat Daerah
 - e. Verifikasi Rancangan Renja oleh Bappeda
 - f. Perumusan Rancangan Akhir Renja Bappeda Provinsi Sumatera Barat direncanakan di bulan Juni
 - g. Verifikasi Rancangan Akhir Renja oleh Bappeda
 - h. Reviu Renja Bappeda Provinsi Sumatera Barat oleh Inspektorat
 - i. Perbaikan Renja Bappeda Provinsi Sumatera Barat berdasarkan hasil verifikasi dan hasil reviu
 - j. Penetapan Renja Bappeda Provinsi Sumatera Barat setelah Penetapan RKPD Provinsi Sumatera Barat
4. Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah yang telah direviu oleh APIP daerah.
5. Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD.
6. Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS.
7. Penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA-SKPD.

8. Bappeda Provinsi Sumatera Barat melakukan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) berdasarkan Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA-SKPD.
 9. Melakukan Penginputan RKA melalui SIPD RI
 10. Verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) internal oleh Tim Renja Bappeda Provinsi Sumatera Barat.
 11. RKA Bappeda Provinsi Sumatera Barat direviu oleh Inspektorat
 12. RKA Bappeda Provinsi Sumatera Barat diverifikasi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
 13. RKA Bappeda Provinsi Sumatera Barat diperbaiki sesuai hasil riviun dan hasil verifikasi.
 14. Penyusunan Rancangan Perda tentang APBD
 15. Penyampaian Rancangan Perda tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD
 16. Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah
 17. Menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/ Gubernur untuk dievaluasi.
 18. Hasil evaluasi Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD.
 19. Jika ada perbaikan, maka RKA diperbaiki sesuai dengan Rancangan APBD
 20. Penetapan Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi.
 21. Rencana Kerja dan Anggaran atau RKA Bappeda Provinsi Sumatera Barat disesuaikan dengan Perda APBD.
 22. RKA Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah bisa dicetak menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang nantinya disahkan oleh PPKD dan disetujui oleh Sekretaris Daerah untuk selanjutnya bisa dibelanjakan.
6. Realisasi anggaran belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 yaitu 97.34% dari dianggarkan. Dengan

rincian realisasi belanja pegawai 98.94% dari yang dianggarkan. Realisasi belanja barang dan jasa 97.93% dari yang dianggarkan dan realisasi belanja modal sebesar 76.10% dari yang dianggarkan. Dengan ini berarti program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2021 secara umum telah terlaksanakan dengan efektif. Karena dapat dilihat dari penyerapan dana anggaran belanja mencapai diatas 90%.

7. Realisasi anggaran belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022 yaitu 99.18% dari dianggarkan. Dengan rincian realisasi belanja pegawai 99.58% dari yang dianggarkan. Realisasi belanja barang dan jasa 99.12% dari yang dianggarkan dan realisasi belanja modal sebesar 96.63% dari yang dianggarkan. Ini berarti pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 dalam pencapaian target yang telah ditetapkan tidak terdapat kendala atau permasalahan yang berarti dan tidak ada pencapaian yang di bawah 96%.
8. Dibandingkan dengan realisasi belanja Bappeda Provinsi Sumatera Barat TA 2021, Realisasi Belanja Bappeda Provinsi Sumatera Barat TA 2022 mengalami kenaikan dari sebesar 1,84 %. Hal ini disebabkan karena :
 - Kenaikan realisasi belanja pegawai sebesar 1,85 % dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karna adanya gaji ke-14 dan Tunjangan Hari Raya (THR) serta kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala pegawai.
 - Menurunnya realisasi belanja barang dan jasa sebesar 28,15 % dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena belanja barang dan jasa yang mengalami penghematan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah atau disebut juga dengan *self blocking*.

- Menurunnya realisasi belanja modal sebesar 5,81 % dibandingkan tahun sebelumnya tetapi meningkatnya sebesar 18,20% di bagian Belanja Modal Peralatan dan Mesin di Tahun Anggaran 2022 dibanding Tahun Anggaran 2021 dan untuk anggaran dan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan hanya terdapat di tahun anggaran 2021.

9. Dari persentase rasio antara total realisasi belanja dengan total anggaran belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 sebesar 97.34 % dan mengalami peningkatan pada tahun 2022 sebesar 99.18 %. Hal ini menunjukkan penyerapan dana anggaran belanja pada tahun anggaran 2021-2022 mengalami peningkatan.

5.2 Saran

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah salah satu instansi pemerintah yang berkompeten dalam meningkatkan kinerja karyawannya dalam bekerja dan memberikan data yang tepat dan akurat untuk mencerdaskan bangsa. Dalam hal ini saya sebagai penulis ingin memberikan saran, dan semoga dapat berguna bagi BAPPEDA Provinsi Sumatera Barat untuk dimasa yang akan datang. Disarankan kepada BAPPEDA Provinsi Sumatera Barat untuk kedepannya agar dapat lebih memaksimalkan lagi penggunaan anggaran yang diperoleh dari APBD agar kedepannya bisa menjadi lebih baik dalam menghasilkan data yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah dan juga oleh masyarakat banyak dengan harapan untuk memperbaiki kehidupan negara dimasa yang akan datang dan juga dalam mencerdaskan bangsa.